

## PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) DAN POLITIK UANG

Karningsih  
[siskacahaya10@gmail.com](mailto:siskacahaya10@gmail.com)

### ABSTRAKSI

Pola pemilihan kepala daerah yang membutuhkan banyak biaya membuat titik rawan terhadap darurat politik uang yang menjadi awal tumbuhnya korupsi, oleh karena itu semua komponen yang terkait dengan relas yang kompeten dalam pemilihan kepala daerah harus menyiapkan kandidat dengan yang terbaik itu adalah nominasi yang diajukan dari partai atau partai koalisi dan kader independen yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi dan memiliki rekam jejak yang baik memenuhi harapan masyarakat pemilih. Di tangan pendidikan politik perlu diberikan kepada masyarakat pemilih sehingga masyarakat memahami kepala daerah dengan tidak menjual suara dengan uang, dan memilih menurut hati nurani bukan karena memberi. Biaya politik menjadi tinggi ketika seorang tokoh yang dinominasikan kurang berakar, kurang dikenal dan kurang terlibat dalam masyarakat

Kata kunci: pemilihan bupati, partai politik, politik biaya tinggi, politik uang

### ABSTRACT

*The pattern of election of regional heads that require a lot of cost to make the point of prone to the emergency of money politic which become the beginning of the growth of corruption, therefore all components associated with relas competent in the election of regional heads should prepare candidates with the best it namely nominees proposed from party or party coalition and independent cadres who have high credibility and integrity and have a good track record meet the expectation of the voting community. On the hand political education needs to be given to the voting community so that people understand the regional head by not selling the vote with money, and choosing according to conscience not because of giving. Political cost become high when a nominated figure is less rooted, less known and less involved in the community*

*Key words: election district head, political parties, high cost politics, money politic*

### A. Pendahuluan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan ajang kompetisi secara konstitusional untuk menentukan penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) untuk masa tertentu. Tahun 2018 dan tahun 2019 sebagai tahun politik, akan berlangsung Pilkada serentak yang digelar di sebanyak 171 daerah otonom di Indonesia, yaitu 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Di provinsi Jawa Tengah selain selain menggelar Pilkada di tingkat Provinsi juga bersamaan dengan Pilkada tingkat Kabupaten /kota yaitu Banyumas, Temanggung, Kudus, Karanganyar, kota dan Kabupaen Tegal, dan Magelang (Suara Merdeka, 13 Maret 2018)

Pemilihan umum (pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, pemilu dan pemilihan kepala daerah melibatkan seluruh warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan, yang ditentukan undang-undang. Pemilu dan pemilihan kepala daerah adalah alat sosial yang memberikan akses yang seluas luasnya kepada seluruh warga negara secara "individu" ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan. Di sini warga negara diberi kebebasan untuk memilih.

Kenaikan suhu politik menjelang pelaksanaan, dan pasca penyelenggaraan pemilu dan pemilihan merupakan hal yang wajar, karena sebagai ajang kompetensi secara konstitusional, dan menentukan penyelenggara negara (eksekutif dan legislatif) dalam kurun waktu tertentu. Sebagai warga negara yang baik harus

aktif mengikuti setiap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan kepala daerah,, dengan menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Penyelenggaraan Pemilihan (Pilkada) sertentak tahun 2018, seluruh tahapannya dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Pemilu dan Pemilihan (Pilkada) memang tidak lebih dari "pesta" demokrasi dan merupakan syarat dari demokrasi.

Pemilihan umum dan Pemilihan Kepala Daerah sebagai mekanisme utama demokrasi harus mampu menghasilkan badan-badan perwakilan yang sanggup membela dan memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan sebaliknya hanya membagikan "kue" kepada kalangan elite yang terbatas, maka substansinya sama dengan perilaku otoriter Orde Baru yang sudah ditolak rakyat. Sebaliknya reformasi juga menyebabkan berbagai akses , dan menggelinding tanpa etika , penyebabnya adalah tidak didukung format politik yang memadai dan tidak ditopang fondasi ekonomi. ( Oka Mahendra S, 2004).

Pergulatan politik yang kini sedang berlangsung tampak transparan , dan cenderung kasar, hal ini terlihat dari berbagai kepentingan partisan, yang mendominasi percaturan politik nasional. Perebutan kekuasaan ekonomi dan politik dilakukan tanpa basa - basi, dan meninggalkan etika. Suap atau sogok, dan peristiwa tangkap tangan yang berhasil menjaring sejumlah kepala daerah dan calon kepala daerah menjadi tontonan murah di arena politik. Salah satu penyebabnya adalah ciri-ciri praktek penyelenggaraan pemerintah negara saat ini, yang lebih menampilkan ciri-ciri yang

dilihat dari pengurangan kekuasaan membuat undang-undang di pihak presiden , dan menggesernya sebagai kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan salah kaprah implementasi otonomi daerah, menjadikan maraknya korupsi yang melibatkan para pejabat daerah. Otonomi Daerah yang tidak diikuti peningkatan partisipasi dan pengawasan masyarakat menjadi salah satu penyebab maraknya korupsi di daerah, sehingga otonomi daerah menguatkan persekongkolan elite atas dasar ikatan keluarga (nepotisme), kesukuan ( Primordial yang sempit), dan asosiasi bisnis (kolusi)., Hal ini merupakan upaya memindahkan korupsi yang dulu marak dipusat ke daerah. (Andhi Nirwanto, 2013). Pola Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang membutuhkan banyak biaya, menjadikan titik rawan munculnya *money politic* yang menjadi awal tumbuhnya korupsi. Tulisan ini akan memelihat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada ) dan politik biaya tinggi.

## **B. Pendidikan Politik**

Pemilu dan Pilkada adalah sebuah pesta yang diselenggarakan oleh rakyat melalui istitusi negara, dan tamunya juga rakyat melalui institusi partai politik. Menjelang Pemilu dan Pilkada partai politik berlomba lomba mengumpulkan massa. Hal ini merupakan keyakinan bahwa orientasi partai massa lebih menjanjikan daripada partai kader, ini artinya mengumpulkan massa dengan jumlah besar berarti kekuatan ada diangan mereka. Pendidikan politik seperti ini mencerminkan bahwa partai politik tidak percaya diri, dengan menggunakan pola pola lama untuk membangkitkan sentimen pemilih, yang tidak disadari dapat memicu

konflik di akar rumput. Potensi konflik mudah terbakar karena partai politik tidak mengedepankan pendidikan politik yang cerdas, tetapi pendidikan politik berdasarkan loyalitas absolut.

Model Pendidikan politik loyalitas absolut membawa masyarakat tidak dapat berfikir rasional, dan bebas menentukan pilihan. Ironisnya ada kecenderungan partai politik yang berorientasi pada pragmatisme dengan menjual isu yang dikemas untuk membangkitkan emosi kedaerahan, keagamaan, dan kesukuan. Isu ini membuat masyarakat hilang rasionalitas dalam memilih calon-calon bermutu. Mutu calon ditentukan dari : Pribadi calon, apakah benar mempunyai kemampuan manajerial yang handal dalam mengelola wilayah yang plural, mempunyai integritas yang dapat dipertanggung jawabkan, kejujuran yang diukur dari seberapa besar kekayaan yang dimiliki, dan dari mana diperoleh. Partai politik seyogyanya membangun kesadaran masyarakat, untuk tidak sekedar menjadi alat politik , setelah itu dibuang begitu saja. Sudah saatnya rakyat dijadikan sebagai subyek yang kritis dan selektif dalam berbagai kebijakan partai, bukan dijadikan permainan partai.

Dalam setiap pemilihan umum (pemilu) baik pilpres, pilem, maupun pilkada (pilgub atau pilbub) suara pemilih terbanyak berada di akar rumput pedesaan , masyarakat pedesaan tidak paham apa politik dengan berbagai atributnya. Dalam memilih pemimpinnya (presiden , Gubernur, walikota, dan bupati) masyarakat pedesaan (akar rumput) tidak mengenal secara detail calon-calon yang akan dipilihnya. Dalam perkembangan politik saat ini masyarakat desa sudah terlanjur mendapat pembelajaran politik yang

salah , dari para politikus karbitan. Politikus karbitan dalam menggalang massa pemilih dengan memberikan amplop berisi uang, dengan harapan bersedia memilih calon peserta pemilu yang diusung melalui partai yang diunggulkan , inilah pelajaran yang diterima oleh masyarakat pemilih di pedesaan dan dijadikan patokan setiap ada pemilihan umum baik pilgub, pileg, dan pilkada (pilgub dan pilbub). Pembelajaran politik model itulah yang merusak kesakralan pemilu yang sudah diatur dalam undang-undang, bahwa Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum,bebas, rahasia,jujur,dan adil . Pelanggaran akan terus berulang, apakah masyarakat pantas untuk disalahkan karena telah menerima uang "transport " , masyarakat desa tidak tahu apa itu politik dan pelanggaran pemilihan umum (Pemilu), tentu saja tidak salah , disini para pemimpin partai dan kader kader partai yang memberikan pendidikan politik yang salah , menghalalkan segala cara untuk kemenangan pemilu dan pilkada.

Fenomena tersebut bukan hal yang baru, ketika parpol hanya memberikan perhatian pada rakyat ketika menjelang pemilu, kemudian melupakan ketika mereka telah memperoleh kekuasaan , dengan kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Dari sini antipati rakyat mulai tumbuh, kampanye yang digelar pada waktu Pemilu dan Pilkada idak mendapat perhatian masyarakat, Massa partai yang hadir didalam kampanye yang diselenggarakan di lapangan terbuka pada umumnya bukan anggota partai asli, massa datang ke acara kampanye bukan untuk mendengarkan juru kampanye yang menebar janji-janji, tetapi untuk menikmati musik dangdut yang disuguhkan. Bahkan suatu hal yang tidak asing adanya massa "bayaran" yaitu massa partai yang dikerahkan

dan dibayar untuk memeriahkan kampanye, sehingga dapat menunjukkan kalau partai banyak pendukungnya, sebagai ajang promosi bahwa partai tertentu banyak pendukungnya.

Masyarakat menjadi pesimis pada pemilu 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2018 akan dapat membawa perubahan yang mendasar. Keraguan dapat tercermin dari sikap partai peserta pemilu yang menonjolkan hiburan daripada program kerja yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak memiliki prioritas yang jelas untuk membangun sebuah sistem demokrasi, dan syarat sistem ini akan jalan kalau ada peradaban politik. Peradaban politik mencerminkan perilaku politik yang berakal sehat dan tidak berdasarkan sentimen emosional saja.

Seorang antropologi yang mengamati politik Indonesia, (James Siegel dalam Benny Susetyo, 2004 : 87) mengatakan bahwa setelah Soekarno meninggal, tidak ada lagi yang menjadi penyambung lidah rakyat. Hasil penelitian ini sangat mengejutkan bagi publik bahwa realitas kedaulatan rakyat sebenarnya sudah hilang, tergantikan dengan kedaulatan uang. Mengapa ini bisa terjadi ? Karena elite politik hanya memberi keyakinan bukan pengetahuan.

Keyakinan inilah yang kemudian dimobilisasi dengan isu-isu sara, jarang sekali peserta pemilu yang memberikan pengetahuan yang cukup kepada konstituen, tentang caleg-caleg mereka yang bermutu, berkomitmen, bernalar, dan bermoral. Kenyataannya ini tidak pernah terjadi karena yang dimunculkan ke permukaan hanya sekitar gambar partai bukan realitas yang sebenarnya. Di negara yang demokratis, persaingan antar partai

dan kelompok masyarakat untuk meraih kekuasaan adalah merupakan fenomena yang biasa. Hanya saja di negara-negara yang masih mempraktekkan demokratis secara eksperimentatif, persaingan memperebutkan kekuasaan oleh kelompok politik (partai politik) berpeluang menimbulkan berbagai pergolakan sosial yang mengakibatkan pembangunan menjadi terabaikan, karena politik sebagai panglima (Budi Setiyono, 2012).

Melihat hal ini politik hanya dipahami sebagai sarana untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan atau menjadi tempat pertarungan antara kekuatan dan kepentingan uang. Rakyat tidak lagi membutuhkan keyakinan berupa janji janji saja, melainkan perubahan nyata yang dapat merubah kehidupan menjadi lebih baik. Selama ini permainan partai cenderung menimbulkan suhu politik makin memanas, dan memicu potensi konflik. Namun dilain pihak masyarakat harus rasional dalam menentukan pilihan politiknya.

### C. Peran Partai Politik dan Politik Biaya Tinggi

Demokrasi masih diwarnai politik biaya tinggi, khususnya Pemilu Kepala Daerah, baik pemilihan Gubernur maupun pemilihan bupati/walikota. Namun atas dasar Undang-Undang Pemilu Kepala Daerah sebagai bagian dari proses "pembangunan demokrasi" dan demokratisasi tetap harus terselenggara dengan baik, oleh karena itu seluruh komponen yang terkait dan berkompeten dalam hal pelaksanaan pemilu Kepala Daerah, harus mempersiapkan bakal calon dengan sebaik-baiknya, yang berasal dari kader-kader partai politik maupun dari independen, yang mencerminkan sosok pemimpin yang benar-benar memenuhi

harapan rakyat pemilih, salah memilih pemimpin akan berakibat langsung pada jalannya pemerintahan, pembangunan, dan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat lima tahun ke depan.

Kepala Daerah sebaiknya orang yang benar-benar dikenal di daerahnya, dan oleh karena itu dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan kepala daerah merupakan sebuah proses pembelajaran demokrasi di Indonesia sebelum masa kemerdekaan sampai era reformasi. Secara substansial pelaksanaan pilkada langsung dengan sistem demokrasi dan rakyat diberikan wewenang luas untuk memilih secara langsung siapa calon Kepala Daerah yang mereka kehendaki yang berkualitas dan berintegritas tinggi, namun dalam perjalanan sejarah belum pernah tercapai harapan ini, karena proses pemilihan pemimpin tidak pernah terlepas dengan politik uang dan ketidak jujuran. Politik uang dilarang dengan berbagai sanksi, namun realitanya pelanggaran tetap dilakukan oleh peserta pemilu, mereka adalah calon pemimpin.

Di awal reformasi masyarakat mempunyai harapan yang tinggi akan ada perubahan, dan mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap partai dan proses pemilihan umum (Pemilu). Realitanya partai politik hanya menjual visi dan misi pada saat pemilu ( Pileg maupun Pilkada), kemudian melupakannya ketika mencapai puncak kemenangan. Kebiasaan sejumlah partai politik yang menggunakan politik uang untuk menarik dukungan membuat masyarakat terarah menikmati uang partai, tanpa peduli visi dan misi partai. Masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan parpol, kepercayaan masyarakat pada parpol telah terkikis.

Partai Politik sebagai suatu organisasi secara ideal untuk memobilisasi, dan mengaktifkan rakyat, mewakili kepentingan tertentu, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan sarana suksesi kepentingan politik secara sah dan damai. Menurut Mark Hagopian mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan atau kebijakan publik pemerintah ( Arbi Sanit , 1984).

Sangat tidak pantas partai diarahkan sebagai upaya untuk memperoleh kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Ada kecenderungan partai saat ini dikuasai oleh orang-orang yang punya modal uang saja. Sehingga orang yang memiliki uang dapat dicalonkan menjadi calon wakil rakyat atau calon Kepala Daerah, yang setelah jadi tidak berpihak kepada rakyat. Rakyat memilih wakil rakyat atau Kepala Daerah hanya melihat dari segi ekonomi bukan segi kemampuannya sebagai pemimpin masyarakat. Partai bukan sebagai ajang untuk saling mengalahkan satu sama lain, tetapi yang lebih penting bahwa partai sebagai pengusung calon Kepala Daerah, maka harus berorientasi pada basis pendukung yang luas dan mempunyai ideologi yang cukup jelas, untuk memobilisasi massa dan mengembangkan organisasi yang rapi dalam mencapai tujuan ideologi. Partai harus dapat memberikan pendidikan politik bagi para anggotanya. Pimpinan tertinggi partai harus melakukan kontrol yang sangat ketat terhadap bawahan dan anggotanya. Partai dapat menempatkan calon wakil rakyat atau Calon Kepala Negara

sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya.

Partai sebagai wadah untuk menampung aspirasi dan keinginan masyarakat, maka partai harus bisa mengerti harapan masyarakat : (1). Partai harus dapat menyediakan tempat untuk berdiskusi tentang masalah-masalah sosial dan menyampaikan aspirasinya; (2). Para calon Kepala Daerah dapat langsung terlibat dalam kegiatan - kegiatan sosial, sehingga dapat introspeksi tentang kepastian dirinya dalam partai tersebut ; (3) Partai dapat membawa aspirasi masyarakat dan mempengaruhi kebijakan pemerintah ; (4) Partai dan pendukungnya harus jujur, bijak, demokratis, legowo, mempunyai integritas, kesamaan misi, dan mengutamakan kepentingan bersama bukan kepentingan pribadi : (5) Partai tidak hanya memberikan janji -janji saat kampanye saja, melainkan benar-benar melaksanakan amanat rakyat saat sudah berkuasa.

Biaya politik menjadi tinggi bila seorang tokoh yang diusung oleh partai atau koalisi partai kurang berakar, kurang dikenal dan kurang berkenan di masyarakat. Orang yang mempunyai rekam jejak bagus seperti walikota Surabaya Bu Risma tidak harus mengeluarkan biaya tinggi. Partai tidak minta mahar yang tinggi.karena sudah menjadi pilihan masyarakat. Berbeda bila yang diusung belum dikenal rekam jejaknya dan kiprahnya dimasyarakat maka perlu membangun pencitraan , dengan memikat partai dan masyarakat dengan menghalalkan segala cara seperti ini pasti membutuhkan biaya yang tinggi. Politik biaya tinggi dapat dihindari manakala partai mampu menyiapkan kader-kader yang mumpuni untuk duduk di eksekutif dan legeslatif, dan mempunyai rekam jejak yang baik.

Apabila pengkaderan dan penempatan orang-orang partai di eksekutif dan legeslatif sudah baik, maka lama kelamaan politik biaya tinggi dapat dihilangkan. Didukung kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara benar. Kedepan partai juga harus lebih selektif menentukan siapa yang layak diusung.

#### **D. Kesimpulan**

Peran partai politik dalam pilkada dimata masyarakat makin melemah masyarakat hampir tidak percaya lagi pada partai politik , karena partai politik dianggap hanya memberikan janji janji saja, tetapi melupakan saat mencapai kemenangan. Di awal reformasi masyarakat mempunyai harapan yang tinggi dan kepercayaan yang tinggi terhadap partai dan proses pemilu, namun faktanya banyak kepala daerah merupakan hasil pemilihan pilkada yang langsung dipilih oleh masyarakat dengan "pemberian", selama ini masyarakat diminta untuk memilih calon pemimpin mereka yang tidak dikenalnya, seperti membeli kucing dalam karung, yang mungkin justru tidak mewakili mereka. Kedaulatan telah bergeser karena tidak lagi kedaulatan rakyat, melainkan kedaulatan uang.

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada hakekatnya adalah memilih pemimpin yang berkualitas dan berintegritas tinggi, namun dalam perjalanan sejarah panjang perpolitikan di Indonesia, belum tercapai harapan ini, karena proses pemilihan pemimpin sering dikotori dengan politik uang, meskipun dilarang, dengan berbagai sanksi , praktek politik uang tetap dilakukan dari pemilu ke pemilu berikutnya. Kebiasaan dengan memberikan imbalan kepada masyarakat agar dapat memperoleh kemenangan , dalam Pemulihan Kepala Daerah terutama diberikan

pada massa akar rumput (pedesaan). Masyarakat awan tidak lagi bisa berfikir melalui pemilu bangsa ini bisa menjadi baik, yang terpenting dari pemilih adalah imbalan apa yang diberikan, maka diperlukan pendidikan politik agar menjadi pemilih yang cerdas. Politik biaya tinggi dapat dihilangkan apabila pasangan calon yang diusung dari partai merupakan kader-kader terpilih dan berkualitas mempunyai komitmen dan integritas yang tinggi untuk mengubah mindset masyarakat, memilih pemimpin harus bersih dar politik uang (*money politic*)

### **Daftar Pustaka**

- Andhi Nirwanto, Otonomi Daerah Versus Desentralisasi korupsi, Semarang, Aneka Ilmu, 2013
- Arbi Sanit, Sistim Politik Indonesia Indonesia, Jakarta, CV Rajawali, 2000
- Budi Setiyono, Birokrasi Dalam Perspektif Politik dan Administrasi, Bandung Nuansa, 2012
- Benny Susetyo, Hancurnya Etika Politik, Jakarta, Buku Kompas, 2004
- Widyatama, Pilkada Langsung, Yogyakarta, Forum Komunikasi Nusantara, 2004
- Citra Umbara, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bandung, Citra Umbara, 2014